



Magister Administrasi Publik  
DEPARTEMEN MANAJEMEN DAN KEBIDAAAN PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

# KONDISI PEKERJA INFORMAL DI JOGJA



## STUDI KASUS BURUH GENDONG



## DAN PENJUAL BURJO

Edisi 4(2)  
Desember 2023



**INSIGHT**

**Penyunting**

Kurnia C. Effendi

**Penanggung Jawab**

Yuyun Purbokusumo, PhD

**Penata Grafis**

Wahyu Budi Utomo

**Diterbitkan oleh:**

**Institute of Governance and Public Affairs**

Magister Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gadjah Mada

Dan

**IGPA Press**

Magister Administrasi Publik, DMKP Fisipol UGM  
Jalan Prof DR Sardjito, Sekip, Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota  
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos: 55223

No.Telp. : +62 813 9135 5393

Website : [igpa.map.ugm.ac.id](http://igpa.map.ugm.ac.id)

Instagram : [igpa.mapfisipolugm](https://www.instagram.com/igpa.mapfisipolugm)

Email : [igpa@ugm.ac.id](mailto:igpa@ugm.ac.id)

Dipersilahkan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi buletin ini untuk tujuan pendidikan, namun tidak untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, penyebarluasan gagasan, dan advokasi diperkenankan.



[www.map.ugm.ac.id](http://www.map.ugm.ac.id)



[map@ugm.ac.id](mailto:map@ugm.ac.id)



[@mapfisipolugm](https://www.instagram.com/mapfisipolugm)



[Map Fisipol Ugm](https://www.facebook.com/MapFisipolUgm)



# Dinamika Kelas Sosial Perkotaan: Produksi dan Reproduksi *Petty Commodity Producers* Bubur Kacang Ijo di Yogyakarta

Dian Silviani, Dina Melisa Hardiyanti,  
&Christinne Greyssye Fatubun

## PENDAHULUAN

Keberhasilan ekonomi kapitalis yang berkembang pesat pada kenyataannya menciptakan persoalan berupa pembangunan yang tidak merata. Ketidakseimbangan ini mengambil bentuk spasial melalui penciptaan daerah terbelakang, dan bentuk sosial melalui ketidaksetaraan antar-kelas. Ekspansi kapitalis belum menciptakan kesempatan kerja yang cukup bagi sejumlah besar orang yang berkumpul di kota-kota Indonesia, memaksa banyak orang menjadi pekerja mandiri atau *Petty Commodity Producers* (PCP) yang bekerja di

sektor informal.

Ekonomi informal dalam teori ekonomi dualistik yang diperkenalkan oleh Lewis (1954) dan Harris & Todaro (1970) dipahami sebagai kegiatan ekonomi sederhana dan hanya membutuhkan teknologi serta keterampilan sederhana. Hal ini berbanding terbalik dengan ekonomi formal dimana membutuhkan teknologi serta keterampilan tinggi dan modal. Sehingga sektor informal dianggap tidak memiliki hubungan erat dengan sektor formal. ILO melihat sektor informal sebagai alternatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan akibat kegagalan pertumbuhan ekonomi, bahkan Bank Dunia melihat ekonomi informal sebagai sektor usaha sukarela seperti di Bumi Utara (Habibi, 2021). Pemahaman ini mendapat kritik dari Porter & Castells (dalam Habibi, 2021) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara ekonomi informal dan formal dalam kapitalisme. Ekonomi informal turut berkontribusi terhadap ekonomi formal dengan menyediakan upah rendah sehingga ekonomi formal dapat bersaing di level global. Selain itu, adanya informalisasi ekonomi formal mengakibatkan banyak orang menciptakan ekonomi informal.

PCP pada bentuk-bentuk produksi komoditas rumah tangga skala kecil, baik pertanian maupun non-pertanian yang menggabungkan tempat-tempat kelas modal dan tenaga kerja karena produsen komoditas kecil (PCP) memiliki beberapa alat produksi dan bekerja mandiri (Bernstein, 2001). PCP merupakan kelas di luar aktivitas menerima maupun memberi upah dan berada di luar relasi akumulasi kapital-pekerja (Habibi, 2021). PCP bukan entitas yang stabil karena saat dagangannya tidak laku mereka mencari pekerjaan serabutan untuk menambah penghasilan mereka. Rumah tangga PCP dapat mengkombinasi pekerjaannya dengan pekerjaan lain untuk memproduksi dirinya sehingga mereka dapat menjadi pekerja aktif atau pekerja cadangan. Terdapat perbedaan antara kelas kapitalis dan pekerja dalam mengkombinasikan kapital dan tenaga kerja dalam satu

tempat. PCP hidup secara subsisten, memproduksi diri melalui usaha sendiri dengan memproduksi komoditas secara kecil-kecilan melalui modal dan tenaga sendiri. Mereka adalah pekerja wiraswasta mandiri yang mungkin menggunakan tenaga keluarga tapi tidak mempekerjakan tenaga kerja orang lain (Harriss-White, 2014).

Keberlangsungan kelas PCP bergantung pada naik-turun pasar komoditas yang mereka gunakan (Habibi, 2021). Apabila pendapatan PCP dalam bekerja setara dengan modal dan tenaga yang digunakan untuk memproduksi komoditas yang dijual maka mereka dalam kondisi subsisten atau reproduksi sederhana dan memproduksi diri kembali menjadi PCP. Namun, jika pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memproduksi komoditas yang dijual, maka mereka dalam kondisi “tekanan reproduksi sederhana” dan harus menjual tenaganya untuk pekerjaan tambahan lain untuk bertahan hidup. Hal ini dapat terjadi pada karena kelas PCP memang rentan untuk menjadi kapitalis atau pekerja (Habibi, 2021). Inilah mengapa PCP bukan entitas yang stabil, mereka rentan mengalami diferensiasi kelas menjadi buruh atau kapitalis kecil.

Pada konteks di Indonesia, jumlah PCP cenderung lebih besar. Hingga tahun 2019, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 61,46 juta atau sekitar 60% dari total usaha di Indonesia serta menyerap tenaga kerja sebanyak 119,56 juta jiwa atau sekitar 96,9% dari total tenaga kerja (Kemenkopukm, 2023). Meskipun UMKM mampu menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja, tetapi sektor ini merupakan sumber kerentanan bagi pekerjanya. Seperti pada penelitian Setiasih (2016), terhadap pembuat batik tulis di Surakarta, dimana pekerja batik tradisional hidup dalam kondisi yang tidak aman, seperti upah yang tidak menentu, kurangnya perlindungan sosial dan jaminan kesehatan, fleksibilitas jam kerja, kondisi tempat kerja yang buruk, dan rendahnya penghargaan terhadap keterampilan mereka. Penelitian Wicaksono (2021) menyatakan

bahwa adanya ketimpangan relasi pekerja dan pemilik Warmindo di Jogja mengalami ketimpangan relasi dimana pemilik Warmindo dapat mengkondisikan buruh sehingga mereka mau bekerja melebihi jam kerja normal dan menerima upah tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian Zhe Liang et al. (2016) menunjukkan bahwa pekerja informal gajinya cenderung lebih rendah.

Dari sisi jenis pekerjaan, pada tahun 2019 terdapat sekitar 58,2% pekerja informal di Indonesia (ILO, 2023). Salah satu kota yang memiliki banyak pekerja informal adalah Kota Yogyakarta, di mana ada sebanyak 1,20 juta atau 53,38% pekerja informal (BPS, 2022). Di Kota Yogyakarta, salah satu pekerja informal yang dengan mudah ditemui adalah pedagang bubuk kacang hijau atau akrab dikenal dengan burjo. Artikel ini berupaya menunjukkan kondisi kerja dan kerentanan yang dialami oleh pedagang Burjo di Kota Yogyakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan wawancara untuk memahami sikap, persepsi, individu ataupun sekelompok orang yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi persoalan sosial tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode penelitian kuantitatif (Ghony & Almanshur, 2012; Creswell, 2010; Strauss & Corbin, 2009). Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder serta wawancara semi struktural. Data yang digunakan berasal dari data internal instansi serta literatur yang dapat diakses melalui internet. Wawancara dilakukan kepada empat orang responden yang memiliki usaha Burjo. Adapun profil informan dapat dilihat pada tabel 1.

## DINAMIKA KELAS PCP BURJO

Pedagang burjo di Yogyakarta, yang berkeliling dengan gerobak menjajakan dagangannya, sebagian besar adalah kelas PCP. Sebagai PCP, mereka bukan entitas kelas yang stabil dan sangat rentan mengalami diferensiasi kelas. Seperti penjual burjo bernama Kardiman (43 tahun, bukan nama sebenarnya), ketika terjadi pandemi Covid-19 pendapatannya turun drastis, sehingga terpaksa berhutang dan mengeksploitasi diri untuk melakukan pekerjaan tambahan, seperti berjualan pempek rumahan untuk bertahan hidup. Pengurangan pendapatan juga dialami oleh Solihin (26 tahun, bukan nama sebenarnya), salah seorang penjual burjo, yang menyebutkan pendapatannya berkurang hingga 60% pada saat pandemi. Bahkan penjual burjo yang bernama Nugroho (28 tahun, bukan nama sebenarnya), terpaksa kembali ke kampung halaman dan ikut menumpang hidup dengan keluarga di kampung karena pendapatan di masa Covid-19 tidak memungkinkan untuk bertahan hidup di perkotaan.

Kerentanan penjual burjo sebagai kelas PCP juga tidak hanya bergantung pada naik-turun pasar komoditas atau naik-turun pembeli tetapi juga bergantung pada komposisi rumah tangga penjual burjo PCP. Pada ketiga penjual Burjo seperti Kardiman (43), Solihin (26), dan Nugroho (28) produksi komoditas dibantu oleh istri yang harus bekerja ganda tak dibayar di rumah karena mengurus rumah dan anak-anak. Hal ini diakui oleh Kardiman (43), yang sangat merasa terbantuan oleh istri dalam kegiatan produksi. Ketiga penjual Burjo PCP ini mengalami reproduksi sederhana atau *simple reproduction* yang membuat mereka bertahan menjadi penjual burjo dengan status kelas PCP. Andaikan ketiga penjual Burjo ini istrinya hanya fokus pada mengurus rumah dan anak-anak, maka sangat mungkin mereka akan mengalami tekanan reproduksi sederhana atau *subsistence squeeze* dan harus bekerja semakin ekstensif, yang memungkinkan terjadi eksploitasi diri sendiri.

Kerentanan berikutnya pada penjual burjo PCP adalah tempat kerja yang tidak kondusif, terutama penjual burjo dengan menggunakan gerobak dan penjual burjo yang menggunakan tenda di area pedestrian. Penjual burjo PCP rentan digusur karena mereka adalah pekerja informal yang area dagangannya tidak memiliki izin resmi. Hal ini dialami oleh Solihin (26), dia sebelumnya berjualan di depan pasar besar tetapi karena pasar tersebut juga bertepatan dengan jalan utama kota, sehingga dia mendapat teguran dari aparat yang bertugas saat itu. Bentuk kerentanan kerja lain, adalah terkait kerentanan mengalami kecelakaan kerja. Kerentanan ini terutama dialami penjual burjo yang menggunakan gerobak dorong. Kardiman misalnya, ketika gerobaknya jatuh dan terbakar akibat memberhentikan gerobaknya di jalan yang cukup menanjak dan penahan gerobaknya tidak memadai untuk menahan berat gerobak. Akibat kecelakaan itu membuatnya mengalami kerugian yang cukup besar karena harus membeli gerobak beserta isinya yang baru. Kecelakaan kerja juga pernah dialami oleh Solihin, ketika gerobaknya tidak stabil pada saat tengah menjajakan dagangan, yang membuat akhirnya terguling. Sebagai pekerja informal, ketika mengalami kecelakaan kerja, maka mereka sendiri yang menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut.

Terbentuknya PCP, salah satunya dapat terjadi ketika ada orang dari kelas buruh yang mendapat bantuan usaha dari orang terdekatnya, seperti kerabat atau keluarganya. Hal ini terlihat pada penjual burjo, yaitu Jayanti (28 tahun, bukan nama sebenarnya) yang sebelumnya adalah pekerja buruh pada usaha *laundry* selama 4 tahun kemudian menikah dan berhenti menjadi pekerja buruh, hingga akhirnya memiliki usaha burjo bersama suaminya. Hal yang sama terjadi pada Kardiman (43), Nugroho (28), dan Solihin (26), dimana awalnya mereka merupakan buruh yang bekerja di tempat usaha kerabatnya hingga kemudian dibantu keluarga untuk membuka usaha sendiri dan menjadi PCP hingga saat ini.

Keempat penjual burjo PCP di atas menjual dan memproduksi komoditas dengan tenaga mereka sendiri. Hasil pendapatan mereka dalam bekerja setara dengan modal dan tenaga yang digunakan untuk memproduksi komoditas yang dijual, sehingga mereka berada dalam kondisi subsisten dan membuat mereka kembali menjadi PCP. Keberlangsungan PCP juga sangat dipengaruhi oleh komposisi rumah tangga penjual burjo PCP. Hal ini dialami oleh penjual Burjo PCP yakni Kardiman (43), Solihin (26), dan Nugroho (28), dimana produksi komoditas untuk penjualan burjo dibantu oleh istri di rumah membuat mereka mengalami reproduksi sederhana atau *simple reproduction* dan menjadikan mereka kembali sebagai penjual burjo PCP.

Sedikit berbeda dengan ketiga penjual burjo sebelumnya, penjual burjo Jayanti (28) yang bekerja lebih keras selain ikut menjadi penjual burjo dia juga memproduksi komoditas bersama suaminya di siang hari dan ditambah lagi bekerja di usaha *laundry* rumahnya, sebagai PCP di pagi hingga siang hari. Jayanti sendiri merasa tidak terbebani dengan hal tersebut dan lebih menyukai dirinya menghabiskan waktu untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan. Kegiatan penjualan burjo dilakukan bersama suaminya sehingga anak-anak mereka yang masih kecil dititipkan ke orangtuanya. Pendapatan penjual burjo Jayanti mulai mengalami surplus sehingga memiliki tabungan, yang rencananya akan digunakan untuk membuka usaha sampingan. Jayanti menyampaikan saat ini mereka siap untuk membuka cabang usaha burjo dan sedang dalam pencarian pekerja untuk mengelola usahanya. Surplus pendapatan yang berkelanjutan akan memberikan peluang bagi Jayanti untuk terdiferensiasi kelas menjadi penjual burjo kapitalis. Hal sebaliknya jika surplus pendapatan tidak berlanjut maka akan membuat mereka kembali menjadi penjual burjo PCP, seperti yang dialami oleh Kardiman. Kardiman pernah memiliki surplus pendapatan hingga akhirnya beralih ke penjual burjo kios, dan sedang berupaya merekrut pekerja—yang membuatnya dari PCP menjadi kapitalis. Namun, ketika

pandemi Covid-19 kios dagangannya sepi dan membuatnya tidak dapat membayar kontrakan selama dua tahun. Pandemi Covid-19 juga membuat Kardiman harus berhutang untuk bertahan hidup. Kejadian tersebut membuat Kardiman kembali menjadi penjual burjo dengan gerobak dan bertahan menjadi kelas PCP.

**Tabel 1 Kondisi Kerja PCP Burjo**

	Kardiman	Solihin	Jayanti	Nugroho
<b>Usia</b>	43 tahun	26 tahun	28 tahun	28 tahun
<b>Status</b>	Sudah menikah dan 2 anak	Sudah menikah dan 1 anak	Sudah menikah dan 2 anak	Sudah menikah dan 1 anak
<b>Asal kependudukan</b>	Cirebon, Jawa Barat	Cirebon, Jawa Barat	Yogyakarta, DI Yogyakarta	Madura, Jawa Timur
<b>Pendidikan terakhir</b>	SMA	SMP	SMP	SMA
<b>Awal usaha</b>	Ikut saudara di Yogyakarta berjualan Burjo menjadi buruh, kemudian tahun 1998 membuat usaha Burjo sendiri dengan dibantu keluarga hingga sekarang	Ikut saudara di Yogyakarta berjualan Burjo menjadi buruh, kemudian tahun 2013 membuat usaha Burjo sendiri dengan dibantu keluarga hingga sekarang	Sebelumnya seorang buruh laundry, kemudian tahun 2018 bersama suami membuka usaha Burjo	Ikut saudara di Yogyakarta berjualan Burjo menjadi buruh, kemudian tahun 2021 membuat usaha Burjo sendiri dengan dibantu keluarga hingga sekarang
<b>Lama kerja</b>	25 tahun	10 tahun	5 tahun	2 tahun

<b>Alat dan tempat usaha</b>	Gerobak, dipinggiran jalan	Gerobak, dipinggiran jalan	Tenda, dipinggiran jalan	Tenda, di area pedestrian
<b>Usaha sampingan</b>	Jual es Jaipong dalam satu gerobak	-	Usaha <i>laundry</i> rumahan	-
<b>Pekerjaan suami/istri</b>	Istri Ibu Rumah Tangga (membantu produksi)	Istri Ibu Rumah Tangga (membantu produksi)	Suami juga seorang pekerja jasa potong rambut	Istri Ibu Rumah Tangga (membantu produksi)
<b>Durasi - Waktu persiapan produksi</b>	Burjo : 2 jam – 03.00 s/d 05.00 WIB	Burjo : 2,5 jam – 02.30 s/d 05.00 WIB	Burjo : 2 jam – 14.00 s/d 16.00 WIB	Burjo: 2 jam – 13.00 s/d 15.00 WIB
<b>Durasi - Jam kerja</b>	5 jam – 06.00 s/d 11.00 WIB	5 jam - 05.30 s/d 10.30 WIB	7 jam - 16.30 s/d 00.00 WIB	7 jam - 16.00 s/d 23.00 WIB
<b>Dampak Covid-19</b>	Tidak bisa membayar rumah selama 2 tahun, Punya hutang 30 jutaan, hingga berjualan risoles rumahan	Penjualan berkurang 60% dari hari normal dan pernah mengalami Covid-19 dibantu keluarga	Tidak terdampak	Pulang kampung, dibiayai keluarga
<b>Hari kerja</b>	28 hari	30 hari	30 hari	29 hari
<b>Kecelakaan kerja</b>	Pernah 1 kali gerobaknya jatuh dan terbakar, sehingga harus mengganti gerobak baru	Pernah 2 kali gerobaknya jatuh, tapi tidak sampai mengganti gerobak baru	Tidak pernah	Tidak pernah

<b>Tindakan penertiban kawasan</b>	Tidak pernah pindah tempat, kalau mendapat teguran, hanya beralih ke area pedestrian	Pernah pindah tempat karena sebelumnya pernah mendapat tegur polisi karena dianggap mengganggu jalan	Belum pernah	Belum pernah
<b>Kelompok Burjo</b>	Silaturahmi, arisan, dan pertemuan 1 bulan sekali (Paguyuban Burjo)	Tidak pernah ikut	Tidak pernah ikut	Silaturahmi, arisan, dan pertemuan 1 bulan sekali (Paguyuban Burjo)
<b>Peluang jadi kapitalis</b>	Pernah 4 tahun di kios, namun sepi hingga kembali menjadi PCP	Belum pernah	Akan membuka cabang, sedang mencari pekerja	Belum pernah
<b>Bantuan Pemerintah</b>	KUR, Bantuan Covid 19	Bantuan Covid 19	Bantuan BPJS	Bantuan Covid 19

*Sumber: diolah dari data lapangan*

Tabel 1 merupakan tabel yang disusun berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, yang menggambarkan kondisi kerja penjual burjo PCP. Kondisi kerja ini meliputi data diri dan sejarah awal berjualan burjo; sarana dan prasarana yang digunakan untuk berjualan; pekerjaan selain dari berjualan burjo; durasi persiapan dan lama berjualan; dampak ketika terjadi krisis; kerentanan yang dialami selama bekerja baik berupa kecelakaan kerja maupun pengusiran atau tidak tetapnya lokasi kerja; adanya kelompok kerja; dan adanya peluang menjadi penjual burjo PCP menjadi kapitalis. Gambaran kondisi kerja

ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengeksplorasi lebih lanjut dalam penelitian ini terkait dengan eksploitasi yang rentan dialami oleh penjual burjo PCP, dimana PCP bukan merupakan entitas kelas yang stabil dan sangat rentan mengalami diferensiasi kelas.

**Tabel 2 Pendapatan PCP Burjo**

	Kardiman	Solihin	Jayanti	Nugroho
Hari Kerja	28	30	30	29
Harga Burjo	5.000	5.000	7.000	6.000
<b>Pendapatan:</b>				
Per Hari	90 bungkus x 5.000 = 450.000	130 bungkus x 5.000 = 650.000	130 bungkus x 7.000 = 910.000	60 bungkus x 6.000 = 360.000
Total pendapatan per bulan	450.000 x 28 hari = <b>12.600.000</b>	650.000 x 30 hari = <b>19.500.000</b>	910.000 x 30 hari = <b>27.300.000</b>	360.000 x 29 hari = <b>10.440.000</b>
<b>Pengeluaran:</b>				
Kacang Hijau	3 kilo x 24.000 = 72.000	3,5 kilo x 24.000 = 84.000	3,5 kilo x 24.000 = 84.000	1,5 kilo x 24.000 = 36.000
Ketan	6 kilo x 18.000 = 108.000	8 kilo x 18.000 = 144.000	8 kilo x 18.000 = 144.000	3 kilo x 18.000 = 54.000
Santan	3 kilo x 15.000 = 45.000	3,5 kilo x 15.000 = 52.500	3,5 kilo x 15.000 = 52.500	1,5 kilo x 15.000 = 22.500
Total produksi/hari	225.000	280.500	280.500	112.500
Total produksi/ bulan	225.000 x 28 hari = <b>6.300.000</b>	280.500 x 30 hari = <b>8.415.000</b>	280.500 x 30 hari = <b>8.415.000</b>	112.500 x 29 hari = <b>3.262.500</b>

Kebutuhan lainnya:				
Sewa tempat	-	-	400.000	400.000
Sewa Kos/ Kontrakan	583.333	833.333	Rumah sendiri	500.000
Listrik	-	-	100.000	-
Air	-	-		-
<b>Total pengeluaran per bulan</b>	<b>6.883.333</b>	<b>9.248.333</b>	<b>3.875.000</b>	<b>3.762.500</b>
<b>Pendapatan bersih per bulan</b>	<b>5.716.666</b>	<b>10.251.666</b>	<b>18.385.000</b>	<b>6.677.500</b>
<b>Pendapatan bersih per tahun</b>	<b>68.600.000</b>	<b>123.020.000</b>	<b>220.620.000</b>	<b>80.130.00</b>

*Sumber: diolah dari data lapangan*

Tabel 2 di atas merupakan hasil pendapatan penjual burjo PCP berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan. Hasil pendapatan penjual burjo menunjukkan perolehan pendapatan yang cukup menjanjikan untuk jenis usaha mikro. Indikator disusun berdasarkan hasil penjualan dan pengeluaran untuk produksi komoditas yang mereka gunakan. Indikator tersebut meliputi hari kerja berlangsungnya penjualan; harga penjualan burjo per porsi; pendapatan per hari dan per bulan yang diperoleh; total pengeluaran dari produksi komoditas; hingga pendapatan bersih per bulan dan per tahunnya. Gambaran pendapatan burjo PCP akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis lebih lanjut dalam penelitian ini untuk mengetahui peluang terjadinya transisi diferensiasi kelas yang dialami

penjual burjo PCP.

## **EKSPLOITASI DIRI PCP**

Kegiatan reproduksi usaha burjo kepemilikan sendiri atau PCP adalah hasil pendapatan dari penjualan burjo yang laku terjual. Penjual burjo memperoleh pendapatan yang cukup menjanjikan untuk jenis usaha mikro. Meskipun demikian, PCP bukan merupakan entitas kelas yang stabil dan sangat rentan mengalami diferensiasi kelas. Ketika terjadi krisis yaitu pandemi Covid-19 para penjual burjo PCP mengalami banyak kekurangan pendapatan. Hal-hal yang dialami oleh mereka seperti harus terjerat hutang dan mengeksploitasi diri untuk melakukan pekerjaan tambahan seperti berjualan pempek rumahan untuk bertahan hidup, pendapatannya berkurang hingga 60% dari penjualan di kondisi normal (dialami oleh Solihin), hingga terpaksa kembali ke kampung halaman dan ikut menumpang hidup dengan keluarga di kampung karena pendapatan di masa Covid-19 tidak memungkinkan untuk bertahan hidup di perkotaan (dialami oleh Nugroho).

Hasil studi ini menunjukkan bahwa seluruh pedagang burjo mempekerjakan anggota keluarga baik suami maupun istri mereka tanpa diberikan upah. Seluruh pedagang Burjo melakukan eksploitasi diri mereka. Temuan ini memperkuat argumen Bernstein (2006) bahwa terdapat hubungan eksploitasi gender dan generasi (kelas) dalam rumah tangga PCP alih-alih memperlakukan PCP sebagai keseluruhan eksploitasi diri yang homogen. PCP merupakan kegiatan ekonomi di mana rumah tangga adalah unit produksi dan konsumsi, unit yang menggabungkan modal dan tenaga kerja dalam peran gender. Kegigihan produksi PCP adalah karena mereka memiliki atau mengendalikan alat-alat produksi yang terbatas dan spesifik, di mana nilai waktu kerja, diukur dengan produk yang direalisasikan, bisa kurang dari nilai kerja upahan. Kapasitas untuk mengeksploitasi diri sendiri (dan tidak

membayar tenaga kerja keluarga), dan waktu kerja yang lebih besar yang diinvestasikan dalam produksi kurang dari upah yang berlaku, tidak hanya melemahkan hubungan produksi kapitalis dan perubahan teknis yang menggantikan tenaga kerja, tetapi juga merupakan mekanisme untuk mentransfer sumber daya/nilai dari PCP kepada mereka yang mengkonsumsi produk. Beberapa ekonom pedesaan menafsirkan kapasitas ini sebagai efisiensi (Lipion 1968) — dan itu memang dapat menghasilkan penggunaan modal yang lebih efisien secara fisik dan teknologi produksi skala-netral daripada yang terjadi dalam produksi kapitalis (Hazell et al. 2010). Yang lain melihat partisi dan miniaturisasi aset yang mendukung ekspansi dengan perkalian sebagai ‘involusi’ (Geertz 1963). Tetapi keduanya adalah bentuk eksploitasi diri (Harriss-White, 2018).

## **PENUTUP**

Pedagang burjo dari kelas PCP memiliki kecenderungan empiris untuk berkembang dan bertahan hidup melalui eksploitasi diri yang intens, pembagian kerja berdasarkan gender dan generasi di dalam rumah tangga, dan dengan menggabungkan bidang produksi dan reproduksi. Kelas PCP dianggap hanya bersifat sementara karena kerentanan posisinya yang dapat “naik” atau “turun”. Penjual burjo dalam tulisan ini hanyalah sebagian kecil dari kelas PCP yang ada di Yogyakarta, apalagi populasi perkotaan yang besar di Indonesia secara keseluruhan. Adanya surplus populasi relatif dan tidak adanya pilihan untuk bekerja di sektor formal dan pertanian membuat mereka memutuskan menjadi PCP. Implikasi dari hasil studi ini adalah bahwa pemerintah perlu membedakan intervensi terhadap PCP atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). PCP yang masih rentan perlu mendapatkan

bantuan lebih dibandingkan dengan PCP yang telah berhasil menjadi kapitalis kecil.

## Daftar Pustaka

- Bernstein, H. (2001). 'The peasantry'in global capitalism: who, where and why?. *Socialist register*, 37.
- Bernstein, H. (2006). Is there an agrarian question in the 21st century?. *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement*, 27(4), 449-460.
- BPS. (7 November 2022). *Keadaan Ketenagakerjaan D.I. Yogyakarta Agustus 2022*. Diakses 19 Juni 2023 pada [https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1236/keadaan-ketenagakerjaan-d-i--yogyakarta-agustus-2022.html#:~:text=Sebanyak%201%2C20%20juta%20orang,\(67%2C06%20persen\)](https://yogyakarta.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1236/keadaan-ketenagakerjaan-d-i--yogyakarta-agustus-2022.html#:~:text=Sebanyak%201%2C20%20juta%20orang,(67%2C06%20persen).).
- Cresswell, J.(2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, C. (1963). *Peddlers and princes: Social change and economic modernization in two Indonesian towns*. University of Chicago Press.
- Ghony, M.D, & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Habibi, M. (2021). Laju Kapital dan Dinamika Kelas Ekonomi Informal Perkotaan. *Jurnal Prisma*. 40 (3), 13-29.
- Harriss-White, B. (2014). Labour and petty production. *Development and Change*, 45(5), 981-1000.
- Harriss-White, B. (2018). Awkward classes and India's development. *Review of Political Economy*, 30(3), 355-376.
- ILO. (2023). *Women And Men In The Informal Economy: A Statistical Update*. Geneva: ILO. Pg. 17

- Katadata.co.id. (2021). Sebanyak 56,7% Penduduk Indonesia Tinggal di Perkotaan pada 2020. Diakses 23 Juni 2023 pada [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18/sebanyak-567-penduduk-indonesia-tinggal-di-perkotaan-pada-2020#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20memperkirakan,66%2C6%25%20pada%202035](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18/sebanyak-567-penduduk-indonesia-tinggal-di-perkotaan-pada-2020#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20memperkirakan,66%2C6%25%20pada%202035).
- Kemenkopukm (2023). *Laporan Kinerja Kemneterian Koperasi dan UMKM Tahun 2022*. Jakarta: Kemenkopukm
- Lewis, W. A. (1954). *Economic development with unlimited supplies of labour*.
- Liang, Z., Appleton, S., & Song, L. (2016). *Informal employment in China: Trends, patterns and determinants of entry*.
- Lipion, M. (1968). The theory of the optimising peasant. *The Journal of Development Studies*, 4(3), 327-351.
- Setiasih, M. (2016). *Governing the Traditional Business in Urban Community: A Study of Kampung Batik Laweyan, Surakarta Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Strauss, A. & Corbin, J. (2009). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Todaro, M. P., & Harris, J. R. (1970). *Migration, Unemployment And Development: A Two-Sector Analysis*.
- Wicaksono, R. (2021). *Ekonomi Politik Warmindo-Burjo: Studi Mengenai Relasi Kerja-Upahan dari Pekerja dan Pemilik-usaha pada Bisnis Warmindo-Burjo Sami Asih Group* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).



# Realitas Kondisi Buruh Gendong dalam Perspektif Ekonomi Politik

Lina Putri Prabawati, Sepriza Elysa,  
& Siti Nurhidayah

## Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, tidak lantas membuat berbagai pekerjaan tradisional menjadi menghilang. Jika kita pergi ke Pasar Ringinasri (bukan nama sebenarnya), Di Yogyakarta, kita dapat dengan mudah bertemu dengan buruh gendong. Para buruh gendong ini bekerja dengan menjajakan jasa mereka untuk membantu membawa barang yang digendong secara manual, tidak menggunakan alat atau teknologi. Walaupun di abad ke 21, pada kenyataannya pekerjaan sebagai buruh gendong tetap eksis.

Mayoritas buruh gendong di Pasar Ringinasri, pada kenyataannya, adalah pekerja yang telah berusia senja atau lanjut usia.

Persoalan ekonomi, membuat mereka terpaksa tetap bekerja walaupun usianya sudah di atas 60 tahun guna mencukupi kebutuhan sehari-hari (Sari et al., 2008). Kurangnya modal secara ekonomi maupun rendahnya latar belakang pendidikan yang dimiliki akhirnya mendorong mereka untuk bekerja sebagai buruh gendong. Meskipun penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya seringkali kurang, mereka tidak ada pilihan lain selain bertahan pada pekerjaannya (Alfariz et al., 2021).

Dari sisi jenis kelamin, pekerjaan buruh gendong tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan. Motivasi perempuan dan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh gendong tidak hanya terbatas pada peluang kerja yang ada tetapi dikarenakan dorongan untuk memperoleh pendapatan tambahan (Rahmayanti et al., 2017), karena ekonomi keluarga akan goyah ketika mereka tidak ikut bekerja. Hal ini yang menjadikan pekerja atau buruh perempuan memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengurus rumah tangga dan sebagai pencari nafkah.

Melihat kompleksnya permasalahan dalam kasus buruh gendong ini maka penulis berupaya melihat relasi sosial antara buruh gendong dan majikannya dari sisi dinamika ekonomi politik Bernstein (2017). Terdapat 4 pertanyaan pada konsep Ekonomi Politik Bernstein yang mampu menjawab relasi sosial ini yaitu *Who owns what?; Who does what?; Who gets what?; What do they do with it?*

## **Kondisi Kerja Buruh Gendong di Pasar Ringinasri**

Pada dasarnya buruh gendong yang ada di Yogyakarta tidak hanya terpusat di Pasar Ringinasri, melainkan juga beberapa pasar seperti daerah Giwangan, Bantul dan yang lainnya. Namun demikian, dikarenakan Pasar Ringinasri merupakan salah satu pasar yang relatif besar dan menjadi destinasi wisata Yogyakarta, sehingga tidak heran jika Pasar Ringinasri selalu ramai dipadati pengunjung, baik masyarakat

setempat dan juga wisatawan. Keramaian pengunjung yang mendatangi Pasar Ringinasri merupakan peluang bagi para buruh gendong untuk menawarkan jasanya, oleh karena itu tidak heran jika sebagian besar buruh gendong yang berasal dari beberapa daerah Yogyakarta secara terpusat memilih bekerja di pasar tersebut.

Secara umum, buruh gendong yang bekerja di Pasar Ringinasri berasal dari luar Kota Yogyakarta seperti Kulonprogo, Bantul, dan beberapa daerah lain. Akses yang ditempuh para buruh gendong dari rumah menuju ke Pasar Ringinasri tentunya sangat jauh dan membutuhkan waktu lama, sehingga kondisi tersebut yang mendorong mereka untuk memilih tinggal dan bermalam di sekitar pasar dan hanya pulang beberapa hari sekali. Mirisnya, mereka tinggal di emperan atau pinggir pasar yang hanya beralaskan karung tanpa perlindungan apapun. Hal yang dilakukan para buruh gendong tersebut merupakan satu bentuk dan upaya penghematan biaya akomodasi khususnya transportasi.

Pekerjaan buruh gendong dimulai dari awal pasar dibuka dan beroperasi yakni jam dua subuh kemudian berakhir pada jam empat sore setelah pasar tutup. Terkait upah, para buruh gendong ini pendapatannya bergantung dari banyak sedikitnya konsumen yang menyewa jasa mereka. Tidak terdapat tarif secara khusus atau harga yang ditetapkan oleh buruh gendong guna menawarkan jasanya, banyak sedikitnya upah ditentukan oleh pemberian dan kedermawanan pengguna jasa mereka. Dalam waktu satu hari, rata-rata pendapatan mereka sebesar Rp 40.000 - Rp 50.000 dengan berbagai jenis barang yang mereka angkut. Ketika pasar dalam kondisi sepi dan kurang ramai, sedangkan jumlah buruh gendong yang tersebar di setiap lantai Pasar Ringinasri relatif banyak sekitar 244 orang, sehingga tidak jarang dari mereka hanya memperoleh satu pengguna jasa dalam waktu sehari. Jenis barang yang diangkut oleh buruh gendong sangat beragam mulai dari sayur-sayuran, baju, batik dan beberapa barang lain yang

dirasa membutuhkan jasa mereka. Umumnya buruh gendong bisa mengangkut barang dengan berat 30 kg sampai 50 kg dalam waktu sekali angkut. Upah yang diberikan untuk mengangkat sayuran sekitar Rp 2.500 - Rp 4.000, sedangkan untuk jenis baju atau baju mereka memperoleh upah Rp 15.000 - Rp 20.000.

Hasil pengumpulan data yang dilakukan kepada beberapa responden yaitu pekerja buruh gendong di Pasar Ringinasri, ditemukan fakta dan harapan di masing-masing buruh gendong mengenai pekerjaannya. Ibu Surti (bukan nama sebenarnya) berusia 53 tahun yang berasal dari daerah Kulonprogo, ia merupakan tamatan sekolah paket B atau setara dengan SMP. Menjadi buruh gendong merupakan pekerjaan warisan yang diturunkan dari ibunya, ia mulai ikut ibunya menjadi buruh gendong sejak masih duduk di sekolah dasar sampai dengan sekarang. Sama sepertinya, suami dari Ibu Surti juga merupakan pekerja informal sebagai pekerja karawitan di keraton pada hari Sabtu dan Minggu. Dengan jenis pekerjaan dan pendapatan yang seadanya ia masih memiliki tanggung keluarga yaitu 2 anak yang masih bersekolah SMP dan SMA.

Selanjutnya, Ibu Sutini (bukan nama sebenarnya) berusia 75 tahun, yang juga berasal dari Kabupaten Kulonprogo, pekerjaan sebagai buruh gendong telah dilakukannya sejak tahun 1975 sampai dengan saat ini. Beliau tidak memiliki riwayat pendidikan karena tidak pernah mengampu dunia sekolah sehingga hanya pekerjaan tersebut yang dapat dilakukan olehnya. Suaminya merupakan pekerja serabutan di kampungnya sehingga untuk menutup kebutuhan sehari-hari ia harus membantu suaminya dengan cara menjadi buruh gendong. Karena ia sudah bekerja menjadi buruh gendong sejak lama, sampai saat ini Ibu Sutini telah memiliki pelanggan atau pengguna jasa secara tetap. Hal ini tentu saja menjadi peluang bagi beliau untuk tetap memperoleh penghasilan di setiap harinya.

Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, Ibu Karsinah (bukan nama sebenarnya) yang berusia 63 tahun merupakan buruh gendong yang berasal dari Kabupaten Bantul. Ia merupakan tamatan SD yang sejak sekolah sudah bergelut sebagai pekerja buruh gendong karena mengikuti ibunya. Orang tuanya merupakan keluarga dengan tingkat ekonomi rendah sehingga mendorong Ibu Karsinah untuk terjun di dunia buruh gendong sejak usianya masih sangat kecil. Pekerjaan tersebut dilakukan hingga saat untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Tidak hanya mengeluhkan pendapatan yang diperoleh, Ibu Karsinah juga mengkhawatirkan kesehatannya, karena pekerjaan sebagai buruh gendong mengharuskannya naik turun tangga dengan usia yang tidak lagi muda maka rentan mengalami kecelakaan kerja.

Buruh gendong ini merupakan bagian dari pekerja informal. Menurut UNESCO, pekerjaan informal merupakan jenis pekerjaan yang kurang memiliki perlindungan dengan baik, secara hukum dan sosial. Ketiadaan regulasi dan jaminan yang jelas menyebabkan buruh gendong menjadi golongan pekerja rentan (ILO, 2015), berbagai risiko yang kemungkinan menimpa buruh gendong tidak dapat diimbangi dengan perlindungan oleh pemerintah setempat khususnya pada perlindungan kelayakan upah dan kecelakaan kerja.

Sebagai pekerja informal, jam atau waktu libur para buruh gendong selalu berbeda antar-satu dengan yang lainnya. Mereka libur beraktivitas ketika ada keperluan dikampung seperti membantu tetangga hajatan atau hanya untuk beristirahat saja. Keputusan mereka untuk bermalam menginap di Pasar Ringinasri dan tidak pulang setiap harinya adalah untuk meminimalisir biaya, karena pendapatan yang diperoleh dengan pengeluaran biaya akomodasi mereka pulang ke kampung halaman tentu saja tidak sebanding. Biaya transportasi ke Kulonprogo saja mengeluarkan ongkos sebesar Rp 20.000 untuk pulang dan pergi, biaya tersebut belum termasuk pada biaya makan dan minum serta biaya tambahan karena untuk bisa kerumah mereka harus

kembali naik ojek.

Dalam sehari mereka menghabiskan biaya untuk makan dan minum sebanyak Rp 15.000 dengan pembagian Rp 10.000 untuk makan pagi dan sore dan Rp. 5.000 lagi untuk untuk minum. Selain itu mereka juga mengeluarkan biaya untuk penggunaan toilet sebesar Rp. 2.000 untuk mandi dan Rp. 1.000 untuk ke toilet. Yang terkadang penghasilan mereka hanya habis untuk biaya pribadi mereka selama bekerja. Sambil menunggu ada yang membutuhkan jasa mereka, biasa dari mereka mengerjakan pekerjaan sambil seperti mengupas bawang yang tidak setiap hari adanya. Untuk 1 kg bawang yang di kupas dihargai Rp. 1000. Ketika ditanya jika ada pekerjaan lain selain buruh gendong beberapa dari mereka menginginkan dan yang lainnya mengatakan akan tetap menjadi buruh gendong karena pekerjaannya tidak susah dan bisa langsung mendapatkan uang. Jika dihitung kemungkinan pendapat bersih yang mereka terima tiap bulannya dengan menggunakan pendapatan maksimal dengan 26 hari kerja mereka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Rata-rata Pendapatan dan Pengeluaran  
Buruh Gendong per bulan**

Keterangan	Perhitungan	Jumlah
Pendapatan perbulan	Rp. 55.000 X 26 Hari	Rp. 1.430.000,-
Biaya Makan & minum perhari	Rp. 15.000 X 26 hari	Rp. 390.000,-
Biaya ke toilet total perharinya	Rp. 4.000 X 26 hari	Rp. 104.000,-
Transportasi pulang 2 kali dalam sebulan	Rp. 20.000(PP) X 2 kali	Rp. 40.000,-
Pendapatan bersih		Rp. 896.000,-

*Sumber: olah data penulis.*

Dilihat dari tabel di atas, pendapatan yang di peroleh buruh gendong masih terbilang jauh dari UMR Yogyakarta ditahun 2023 dengan nilai Rp 1.981.782. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kondisi kerja dari buruh gendong yang ada di pasar Ringinasri yaitu upah yang diperoleh terbilang minim dengan tarif jasa yang murah membuat kesejahteraan dari buruh gendong perempuan tidak terpenuhi.

**a. Aspek Ekonomi Politik**

Penulis menggunakan konsep ekonomi politik dari Bernstein (2017) untuk menjelaskan dinamika ekonomi politik dalam isu pekerja konten moderator. Berikut ini adalah tabel analisis dinamika ekonomi politik pada buruh gendong

**Tabel 2. Aspek Ekonomi Politik Buruh Gendong**

Pertanyaan	Jawaban
Who Owns What?	<p><b>Buruh :</b>            Dalam kasus buruh gendong, mereka hanya menggunakan kain jarik untuk mengangkat barang di punggung mereka.</p> <p><b>Penyewa Jasa:</b>            Memiliki uang untuk membayar jasa buruh gendong</p>
Who Does What?	<p><b>Buruh :</b>            Pekerjaan buruh gendong mengangkut barang dari suatu tempat ketempat lain secara manual. Menawarkan jasa kepada penyewa jasa.</p> <p><b>Penyewa Jasa:</b>            Menyewa Jasa buruh gendong</p>
Who Gets What?	<p><b>Buruh:</b>            Buruh gendong mendapatkan imbalan berupa uang dari jasa pengangkutan yang mereka lakukan.</p> <p><b>Penyewa Jasa :</b>            Jasa berupa pengangkutan barang belanjaan atau barang dagangannya dapat sampai ke tempat tujuan.</p>

Pertanyaan	Jawaban
What Do They Do With it?	<p><b>Buruh :</b> Pendapatan yang diperoleh oleh buruh gendong dari pekerjaan yang mereka lakukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.</p> <p><b>Penyewa Jasa :</b> Barang sampai ke tempat tujuan dan menghemat waktu.</p>

*Sumber: olah data penulis.*

### **b. Kondisi Kerja Layak**

Berdasarkan kondisi kerja dari buruh gendong, kami menggunakan indikator kerja layak dari ILO (Keban et al., 2021) untuk menganalisis kelayakan kerjanya:

**Tabel 3. kerja layak buruh gendong**

No	Poin Kerja Layak	Indikator Kerja layak	Kondisi Kerja Buruh Gendong	Terpenuhi/ Tidak
1.	Kesempatan Kerja	Peluang dan kepastian mendapatkan pekerjaan	Kesempatan kerja yang terbatas karena tergantung dengan orang yang membutuhkan jasa mereka. Ketatnya persaingan mendapatkan pelanggan akibat jumlah buruh gendong yang banyak.	Tidak
2.	Pendapatan	Komponen hidup layak	Pendapatan yang tidak bisa di prediksi, dan masih tergolong kecil dan pas-pasan	tidak

No	Poin Kerja Layak	Indikator Kerja layak	Kondisi Kerja Buruh Gendong	Terpenuhi/ Tidak
3.	Jam Kerja	40 jam/minggu	Jam bukan pasar yang dimulai pukul 2 pagi sampai pukul 4 sore mengharuskan buruh gendong untuk tetap bekerja mencari pelanggan yang membutuhkan jasa mereka	Tidak
4.	Menggabungkan pekerjaan, keluarga, serta kehidupan pribadi	Hak libur pekerja	Mengatur hari liburnya sendiri, demi menghemat uang kebanyakan dari mereka memilih untuk meminimalkan hari libur mereka.	tidak
5.	Pekerjaan yang tidak diperbolehkan	Tidak ada kerja paksa dan pekerja anak	Tidak ada aturan yang mengatur batas usia untuk bisa menjadi buruh gendong, berdasarkan wawancara banyak dari mereka yang bekerja sedari kecil.	tidak
6.	Stabilitas dan jaminan pekerjaan	Jaminan untuk tidak dipecat atau diberhentikan sewaktu-waktu	Pekerjaan berdasarkan ke inginan dan kemampuan buruh gendong sendiri.	terpenuhi
7.	Kesempatan dan perlakuan yang setara dalam pekerjaan	Tidak adanya diskriminasi	Kebanyak dari mereka merupakan masyarakat DIY.	terpenuhi

No	Poin Kerja Layak	Indikator Kerja layak	Kondisi Kerja Buruh Gendong	Terpenuhi/ Tidak
8.	Lingkungan kerja yang aman	Lingkungan kerja yang aman sehat	Potensi kecelakaan kerja cukup tinggi mengingat kondisi bangunan pasar yang tidak mendukung keselamatan kerja buruh gendong seperti tangga yang curam dan lantai licin, serta tidak adanya tempat tinggal sementara bagi buruh gendong yang berasal dari luar kota Yogyakarta.	tidak
9.	Jaminan sosial	Adanya jaminan kesehatan dan keselamatan	Tidak adanya jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada buruh gendong mereka harus membayar jaminan kesehatan mereka sendiri.	tidak
10.	Dialog sosial	Dilihat dalam proses pengambilan keputusan dan menyampaikan aspirasi	Adanya yayasan Annisa Swasti berasal dari LSM yang membantu mengelola buruh gendong.	terpenuhi

*Sumber: diolah dari data lapangan.*

Berdasarkan indikator ILO, dapat dipahami bahwa dari sepuluh indikator hanya tiga yang memenuhi kategori kerja layak untuk buruh gendong dan dapat disimpulkan bahwa kondisi kerja buruh gendong tidak layak. Hal ini menyebabkan kondisi kerja yang dialami buruh gendong cenderung mengalami kerentanan dimana tidak adanya jaminan sosial yang diperoleh oleh buruh gendong, kepastian kerja yang

tidak jelas dengan upah yang tidak menentu, serta lingkungan kerja yang beresiko berisiko.

## Kesimpulan

Buruh gendong merupakan pekerjaan yang bekerja secara individu dengan majikan yang berbeda-beda. Buruh gendong di pasar Ringinasri sebagian besar merupakan perempuan, sehingga terdapat isu gender pada pekerjaan ini. Tingkat ekonomi yang rendah dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat mereka melakukan eksploitasi diri sendiri. Hasil pemetaan ekonomi politik dan kerja layak buruh dapat diketahui bahwa pekerjaan ini dinilai tidak layak berdasarkan konsep ILO.

## Referensi:

- Alfariz, F. et al. (2021). Pandangan Buruh Gendong di Indonesia Terhadap Peran Ganda Perempuan. *Jurnal Filsafat*. Vol.31, No.2.
- Bernstein, H. (2017). Political Economy of Agrarian Change: Some Key Concepts and Questions. *RUDN Journal of Sociology*, 17(1), 7 -18. DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-1-7-18
- ILO. (2015). *National employment policies: A guide for workers' organisations*. Retrieved September 8, 2023, from [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed\\_emp/@emp\\_policy/documents/publication/wcms\\_334921.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_policy/documents/publication/wcms_334921.pdf)
- Keban, Y.T., Hermawan, A., dan Novianto, A. (2021). *Menyoal Kerja Layak dan Adil dalam Ekonomi Gig di Indonesia*. IGPA Press
- Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. (2018, April 5). *Buruh Gendong Pasar Ringinasri Dapatkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis*. Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. Retrieved September 8, 2023, from <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/6058>

- Rahmayanti, A., Wibhawa, B., & Nureati, R. N. (2017, Juli). PERAN GANDA BURUH PEREMPUAN SEKTOR INDUSTRI DALAM KELUARGA. *Jurnal Penelitian & PKM*, 4(2), 129 - 389. ISSN 2442-448X (p), 2581-1126 (e)
- Sari, E. N., & Hidayah, N. (2018). *Fenomena Kehidupan Buruh Gendong Perempuan di Pasar Giwangan* (Vol. 7(2)). -Societas,.
- Sari, Ifaty F. (2008). Eksistensi Kehidupan Buruh Gendong Perempuan di Pasar Ringinatri Yogyakarta. *Dimensia*. Volume 2, No. 2.

# Tentang Penulis

## **Dian Silviani**

Merupakan pekerja kerah putih di salah satu lembaga pemerintah pusat. Pendidikan terakhir S1 Administrasi Negara, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Administrasi Publik di UGM. Publikasi yang telah terbit "*Model Business Process Reengineering dan Integrasi Pelaporan pada Pengendalian Intern*" dan "*Melihat PNS sebagai Kelas Pekerja: Kerentanan PNS di Balik Implementasi E-Government di Sebuah Lembaga Pemerintahan*". Minat riset terkait tema ekonomi politik, ekologi politik, dinamika kelas agraria. email: [diansilviani@mail.ugm.ac.id](mailto:diansilviani@mail.ugm.ac.id)

## **Dina Melisa Hardiyanti**

Aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pendidikan terakhir D4 Politik Pemerintahan dan kini sedang menjalani pendidikan S2 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada. Minat riset terkait dengan tema kebijakan publik, ekonomi politik, dan dinamika kelas agraria. Email: [dinamelisahardiyanti@mail.ugm.ac.id](mailto:dinamelisahardiyanti@mail.ugm.ac.id)

## **Christinne Greysyfe Fatubun**

Aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Pendidikan terakhir S1 Ekonomi Akuntansi dan kini sedang menjalani pendidikan S2 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada. Minat riset terkait dengan tema kebijakan publik dan ekonomi. email: [christinnegreysyfefatubun@mail.ugm.ac.id](mailto:christinnegreysyfefatubun@mail.ugm.ac.id)

### **Siti Nurhidayah**

Seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah S1 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Tidar. Riset yang diminati terkait dengan kebijakan publik dan komunikasi kebijakan. Email : sitinurhidayah1996@mail.ugm.ac.id

### **Lina Putri Prabawati**

Mahasiswa di Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah S1 Ilmu Pemerintahan. Publikasi yang pernah diterbitkan berjudul "*Penerapan E-Government Melalui Simpenda Di BKD (Badan Keuangan Daerah) Kota Batu*" dan "*Evaluasi Program Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (BRTSM) Berbasis Pemberdayaan terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban*". Tema riset yang diminati adalah tentang *digital governance*. Email : linaputriprabawati1999@mail.ugm.ac.id

### **Sepriza Elysa**

Mahasiswa di Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah S1 Ilmu Administrasi Negara. Publikasi yang pernah diterbitkan berjudul "*Kendala Implementasi Peraturan Bersama Empat Menteri Tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS/M Di Kota Padang*". Riset yang diminati berkaitan dengan tema kebijakan publik dan kinerja organisasi. Email: seprizaelysa@mail.ugm.ac.id





### **Institute of Governance and Public Affairs (IGPA)**

adalah institusi yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan penelitian serta melakukan diseminasi dan publikasi hasil penelitian di Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada. IGPA merupakan upaya revitalisasi kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan MAP UGM yang berdiri sejak 1994.

Persoalan mengenai studi maupun pengembangan sektor publik di Indonesia dalam era kontemporer menghadapi berbagai tantangan dan problem yang tidak sederhana. Rendahnya kualitas kebijakan publik, lemahnya kapasitas aparat publik, belum efektifnya kinerja organisasi publik, tantangan mewujudkan good governance, maupun kebutuhan untuk penguatan citizenship, jelas membutuhkan jawab dan solusi yang efektif sekaligus komprehensif. Oleh karena itu, IGPA didirikan dan dikembangkan dengan fokus melakukan analisis dinamika organisasi sektor public, citizenship dan governance di Indonesia. Dengan latar belakang pemikiran tersebut, IGPA diharapkan mampu menghasilkan berbagai penelitian yang berkualitas untuk dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder kebijakan publik.



## DIVISI DIKLAT DAN PENDAMPINGAN

Divisi Diklat dan Pendampingan merupakan penyelenggara pelatihan perencanaan bagi aparatur pemerintah (pusat maupun daerah), BUMN, pegiat isu kebijakan publik dan umum serta melaksanakan pendampingan bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan kajian.

### PELATIHAN NON GELAR KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

Pusbindiklatren Kementerian PPN/ Bappenas merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), baik di tingkat pusat maupun di provinsi/ kabupaten/ kota. Dalam upaya efektifitas pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) tersebut, Pusbindiklatren bekerjasama dengan MAP Fisipol UGM. Pelatihan yang dilaksanakan di MAP Fisipol UGM terdiri dari JFP Pertama, Muda, Madya Sosial, PPD RPJMD dan pelatihan substansi lainnya.

### PELATIHAN MANDIRI

Pelatihan Mandiri Reguler didesain dua hari untuk meningkatkan kapasitas ASN maupun pegiat isu publik dengan menghadirkan para pembicara yang expert di bidangnya.

#### ● Tema yang ditawarkan:

- ▷ Indikator Kinerja Untuk Perencanaan dan Akuntabilitas;
- ▷ Penyusunan Proses Bisnis dan SOP;
- ▷ Penyusunan RPJMD Teknokratik;
- ▷ Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ▷ Desain dan Inovasi Pelayanan Publik;
- ▷ Penyusunan Policy Brief;
- ▷ Analisis Kebijakan Publik;
- ▷ Data Analitik Untuk Instansi Pemerintah;
- ▷ dan tema lainnya terkait perencanaan kebijakan, kepegawaian, manajemen dll.

Pendaftaran: [ugm.id/daftarpelatihan](http://ugm.id/daftarpelatihan)

### PENDAMPINGAN DAN KONSULTASI

MAP Fisipol UGM memfasilitasi instansi baik daerah maupun pusat untuk pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan kajian lainnya.

08112543288 (Gery)

082221790833 (Dina)

diklatmap@ugm.ac.id

[www.map.ugm.ac.id/diklat](http://www.map.ugm.ac.id/diklat)

Diklat MAP UGM



# PERSYARATAN PENDAFTARAN PROGRAM STUDI S2/S3 IAP:

1. Ijazah jenjang pendidikan sebelumnya yang sah dan legal;
2. Transkrip jenjang pendidikan sebelumnya yang sah dan legal;
3. Sertifikat/bukti akreditasi program studi jenjang pendidikan yang terakhir;
4. Sertifikat TPA yang masih berlaku;
5. Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku;
6. Rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen/atasan langsung (bagi yang sudah bekerja);
7. Proyeksi keinginan;
8. Surat Ijin (bagi yang sudah bekerja);
9. MoU/PKS/Surat Penetapan sebagai penerima beasiswa (khusus pelamar jalur kerjasama);
10. Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen.

## Syarat Khusus S2:

1. Esai dengan topik Administrasi Publik Kontemporer dapat dikaitkan dengan kebijakan publik atau manajemen publik sebanyak 2000 kata;
2. CV Lengkap;
3. Tes Wawancara.

## Syarat Khusus S3:

1. Proposal Penelitian 3000 kata;
2. CV Lengkap;
3. Tes Wawancara.

 **Informasi Pendaftaran**

<http://um.ugm.ac.id>